

ANALISIS KETIDAKEFEKTIFAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BOGOR MELALUI LENSA TEORI STRUKTURAL FUNGSIONALISME

ANALYSING THE INEFFECTIVENESS OF WASTE MANAGEMENT IN BOGOR DISTRICT THROUGH THE LENS OF STRUCTURAL FUNCTIONALISM THEORY

Annisya Nurfadhillah¹, Rita Rahmawati²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, annisyanurfadhillah62@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, rita.rahmawati@unida.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyse waste management problems in the local government of Bogor Regency using Emile Durkheim's structural functionalism theory approach. The theory is expected to provide in-depth insight into the relationship between waste management problems and the social structure of society in Bogor Regency. The research method is descriptive qualitative with primary and secondary data collection techniques. Waste management is a crucial issue because of its impact on society, environment and social welfare in the community. The research shows that waste management problems in Bogor Regency are not only related to infrastructure and government policies, but also involve community involvement and other social aspects. Structural functionalism theory helps to understand how failures in these social functions can disrupt social balance and stability. Based on the analysis of Structural Functionalism Theory, it was found that improvements in waste management require a holistic approach that includes the roles of all parties in society. Policy recommendations include increased public awareness, active participation in recycling programmes, and improved government policies related to waste management.

Keywords: waste management, analysis, ineffectiveness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan sampah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dengan menggunakan pendekatan Teori Struktural Fungsionalisme dari Emile Durkheim. Teori tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang hubungan antara permasalahan pengelolaan sampah dan struktur sosial masyarakat di Kabupaten Bogor. Metode Penelitiannya ialah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Pengelolaan sampah menjadi isu krusial karena dampaknya terhadap Masyarakat, lingkungan serta kesejahteraan sosial di Masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan aspek-aspek sosial lainnya. Teori Struktural Fungsionalisme membantu memahami bagaimana kegagalan dalam fungsi-fungsi sosial ini dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial. Berdasarkan analisis Teori Struktural Fungsionalisme, ditemukan bahwa perbaikan dalam pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan peran semua pihak dalam masyarakat. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam program daur ulang, serta perbaikan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Analisis, Ketidakefektifan

PENDAHULUAN

Menurut data Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Bogor perbulan Juni tahun 2022 sebanyak 5,93 Juta jiwa, sehingga yang merupakan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat bahkan di Indonesia ialah Kabupaten Bogor. Luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 2.986km persegi, maka penduduk di Kabupaten Bogor memiliki kepadatan mencapai 1.800 jiwa perkilometer persegi (Kusnandar, 2023).

Padatnya jumlah penduduk secara tak langsung berdampak kepada timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah sampah. Signifikannya peningkatan yang terus terjadi pada pertumbuhan populasi dapat menimbulkan penambahan tingkat produksi limbah, terutama limbah rumah tangga. Dimana limbah/sampah rumah tangga yang tidak termasuk kotoran dan limbah/sampah khusus, hal tersebut dijelaskan dalam PP No. 81 Th 2012 perihal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Andri, 2012).

Pemerintahan daerah berperan yang penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu pengelolaan sampah yang menjadi salah satu permasalahan sehingga menghambat suatu Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bogor. Berdasarkan peraturan terkait pengelolaan sampah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan

sampah sebagai sumber daya (Okusa, 2008).

Kabupaten Bogor itu sendiri mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur Pengelolaan Sampah yakni No. 2 Th 2014 perihal Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah menjadi perhatian penting di berbagai kota/kabupaten, salah satunya di Kabupaten Bogor. Sampah-sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan dampak serius bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Bogor, sebagai salah satu daerah yang mengalami pertumbuhan pesat dan perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari tantangan pengelolaan sampah. Data pada tahun 2012 menurut open data jabar, Kabupaten Bogor memiliki timbunan sampah sebanyak 971.59 Ton perharinya, hal tersebut memang menurun dari tahun sebelumnya, namun jika kita melihat beberapa tahun sebelumnya Kabupaten Bogor merupakan peringkat tertinggi dalam jumlah timbunan sampah setiap harinya (DisperkimJabar, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada metode Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dimana data yang diteliti merupakan data berbentuk kalimat dan deskripsi ataupun bisa berupa cerpen. Data kualitatif sifatnya subjektif, sehingga peneliti sebisa mungkin harus menghindari sikap subjektif yang mungkin akan mengaburkan objektivitas pada sebuah data penelitian. Metode analisis kualitatif dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data hasil wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.

Data kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan konsep-konsep utama Teori Struktural Fungsionalisme. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif, hal tersebut bertujuan agar

menciptakan pola deskripsi yang sistematis, bersifat faktual dan akurat terkait fakta serta karakteristik objek penelitian tertentu dengan menggunakan metode kualitatif.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti memperoleh sebuah data dan informasi dimana ditetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Bogor dengan pengambilan data terkait jumlah sampah bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor serta melakukan observasi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor terhadap pengelolaan sampah eksisting oleh Masyarakat melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen.

Analisis yang dilakukan adalah identifikasi kondisi eksisting pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bogor salah satunya di TPA Sampah Galuga. Identifikasi kondisi eksisting terdiri dari gambaran keadaan lokasi yang ditentukan, sedangkan pengelolaan sampah terdiri dari penjelasan berbagai pengelolaan sampah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah adalah salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi sorotan nasional. Sampah dapat dikatakan sebagai hasil dari kegiatan aktivitas manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya selama adanya kegiatan manusia, sampah masih terus bermunculan. Dapat diketahui bahwa melalui pola konsumsi dari Masyarakat yang terus meningkat, total sampah yang dihasilkan setiap tahun pun akan menjadi sebuah peningkatan.

Jumlah data penduduk Kabupaten Bogor tercatat 5.566.838 jiwa dengan rincian, 2.859.683 jiwa penduduk berkelamin laki-laki dan 2.707.155 jiwa penduduk berkelamin Perempuan (BPS, 2023). Jumlah penduduk Kabupaten

Bogor yang besar ini menjadikan populasi sampah yang berjumlah tinggi. Potensi produksi sampah, baik sampah rumah tangga maupun sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bogor yakni sebanyak 2.747 Ton per harinya di tahun 2022. Setelah diakumulasi hanya 28% tingkat pelayanan yang dapat diberikan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dari keseluruhan wilayah kecamatan. Dari data yang didapatkan pada tahun 2022 hanya 257 ton per harinya sampah terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Itu berarti 2.490 ton per harinya sampah tidak terangkut ke TPA yang dengan demikian tidak terkelola dengan baik oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran yang luas dalam pengelolaan sampah, yang menjadikan sampah tersebut lebih memiliki nilai dan sehingga tidak menjadikannya sumber pencemaran lingkungan.

Timbunan masih banyak terlihat di tepian jalan arteri Kabupaten Bogor. Kurangnya kapasitas pengangkutan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor ke Tempat Pembuangan Sampah (TPAS) Galuga menjadi salah satu penyebabnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor saat itu, Bapak Ade Yana Mulyana mengatakan, "Produksi sampah di Kabupaten Bogor mencapai 2.800ton/hari, sedangkan kapasitas pengangkutan sampah hanya 700 ton/hari." Sampah-sampah tersebut tidak diangkut dengan truk-truk besar berwarna kuning milik Pemerintah Kabupaten Bogor, baik itu sampah rumah tangga, restoran, perkantoran, maupun industri." Tak heran jika tumpukan sampah banyak dijumpai di pinggir jalan di Bumi Tegar Beriman.

Pasalnya, armada truk sampah Kementerian Lingkungan Hidup hanya berkisar 200 unit. Sedangkan jumlah ideal truk sampah di Kabupaten Bogor sekitar 600 unit, jika satu truk bisa melayani 10 ribu warga. Karena wilayahnya luas dan banyak warga. di Kabupaten Bogor,

menyebabkan sampah-sampah di Kabupaten Bogor tidak terangkut keseluruhan dan memerlukan pengelolaan serta penanganan lebih lanjut. Hal tersebut bisa dilakukan dengan adanya bank sampah, pembuatan lubang biopori dan pengolahan dengan TPS3R yang dapat mengurangi sampah. Meski tidak signifikan, hal ini cukup membantu mengurangi penumpukan sampah di Bumi Tegar Beriman.

Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor mencatat terdapat 353 bank sampah dan 32 Eco Village serta 144 Desa Ramah Lingkungan (KRL) yang tersebar di Kabupaten Bogor. Sehingga produksi sampah berkurang sekitar 8%, dan dengan adanya bank sampah dan lainnya dimungkinkan untuk mengurangi sekitar 30% sampah yang tidak diangkut. Karena armada untuk mengangkut sampah di Kabupaten Bogor sangat minim, maka diperlukan aksi nyata dari masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri (mdk/fik, 2023).

DLH Kab. Bogor segera menerapkan system zonasi dalam pengelolaan sampah, mulai dari wilayah barat, timur, hingga Selatan. Rencana zonasi tersebut untuk mempersiapkan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Seperti di Bogor Selatan adanya rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, dengan begitu akan ada penambahan volume sampah. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup telah menunjuk tiga kecamatan sebagai pembagian zonasi pengelolaan sampah. Tiga kecamatan itu adalah Jasinga untuk wilayah barat, Cariu untuk wilayah timur, dan Cijeruk untuk wilayah Selatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor saat itu menjelaskan bahwa dengan pembagian zonasi pengelolaan tersebut membuat pembuangan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya terpusat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga. Kemudian, untuk biaya operasional truk sampah dapat lebih

efisien. Sehingga untuk pengeluarannya nanti bisa lebih minim dikarenakan hal tersebut dapat berjalan dengan pengelolaan yang diberikan kepada pihak ketiga.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Bpk. Ferry Roveo Checanova yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan sampah agar penanganannya berjalan efisien dan efektif. Beberapa daerah lain di Indonesia sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi Dinas Lingkungan Hidup tidak perlu memikirkan perawatan kendaraan, BBM dsbnya. Dengan menggandeng pihak ketiga, maka anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk penanganan sampah bisa lebih minim. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup bisa focus pada program dan kegiatan lainnya. Dikarenakan, persoalan sampah selesai ditangani oleh pihak ketiga. Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan analisa dan menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor cukup besar mengeluarkan anggaran penanganan sampah.

Mulai dari perawatan truk sampah, pengadaan BBM, dan lain-lain. Seperti pada APBD Perubahan Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor meminta anggaran sebesar Rp.17 M untuk penanganan sampah selama 3 bulan hingga akhir tahun. Dengan rincian Rp.2 M untuk BBM, Rp.7 M untuk honorarium karyawan, Rp.7 M untuk perawatan kendaraan dan Rp.1,9 M untuk penunjang kegiatan lainnya. Mengajukan anggaran yang besar sangat tidak efisien, sehingga membebani APBD Kabupaten Bogor (Nur Aini, 2022).

Dengan menerapkan Teori Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim dalam analisis ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara permasalahan konkret ini dengan struktur dan fungsi

sosial masyarakat setempat. Analisis ini dapat memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor merupakan aspek vital dalam menjaga kesehatan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial. Namun, seringkali, sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bogor, mengalami ketidakefektifan yang memunculkan hal negatif terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar.

Teori fungsionalisme, yang dikembangkan oleh Emile Durkheim, adalah pendekatan sosiologis yang masyarakat terlihat sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai bagian dan saling berinteraksi untuk mencapai keseimbangan serta stabilitas. Durkheim adalah salah satu pemikir utama dalam perkembangan teori fungsionalisme, dan konsep-konsepnya memberikan dasar bagi banyak aspek dalam sosiologi modern.

Berikut adalah beberapa poin kunci dari teori fungsionalisme menurut Emile Durkheim:

1. Solidaritas Sosial:

Durkheim membedakan menjadi 2 tipe solidaritas sosial: yakni solidaritas mekanis yaitu terjadi dalam masyarakat yang homogen, di mana individu memiliki nilai dan norma serupa, serta solidaritas organik yaitu terjadi dalam masyarakat yang lebih kompleks, di mana individu memiliki peran-peran yang berbeda dan saling melengkapi.

2. Fungsi Sosial:

Teori fungsionalisme menekankan setiap lapisan dari masyarakat mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang berperan pada kelangsungan hidup dan stabilitas sosial. Fungsi-fungsi ini bisa berupa fungsi manifest (tujuan yang jelas dan disadari) atau fungsi latent (tujuan yang tidak disadari).

3. Integrasi Sosial:

Durkheim sangat peduli dengan konsep integrasi sosial, yaitu bagaimana individu-individu dalam masyarakat bersatu. Integrasi sosial dianggap sebagai faktor penting dalam mencegah anomie, kondisi ketika norma-norma dan nilai-nilai masyarakat melemah, yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial.

4. Pentingnya Institusi:

Institusi seperti keluarga, sekolah, dan agama dianggap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat. Mereka berfungsi sebagai lembaga-lembaga kontrol sosial yang membentuk perilaku individu dan mengajarkan norma-norma masyarakat.

5. Penelitian tentang kriminalitas:

Salah satu karya terkenal Durkheim adalah "Pengantar Sosiologi," di mana ia melakukan penelitian tentang statistik kriminalitas. Ia menunjukkan bagaimana tingkat kriminalitas dapat mencerminkan tingkat integrasi sosial dan menunjukkan dampak anomie pada tingkat kriminalitas.

6. Organisasi Sosial dan Keberagaman:

Durkheim memahami bahwa masyarakat modern cenderung menjadi lebih kompleks dan beragam. Dalam pandangannya, keberagaman sosial dan spesialisasi dalam peran-peran sosial adalah karakteristik positif dari masyarakat modern yang menyebabkan solidaritas organik.

7. Konsep Anomie:

Durkheim memperkenalkan konsep anomie untuk menjelaskan ketidakstabilan sosial yang muncul ketika individu-individu merasa kehilangan arah atau bingung karena terputusnya norma-norma sosial.

Teori fungsionalisme Durkheim telah memberikan landasan penting bagi pemahaman sosiologi modern dan terus menjadi dasar bagi banyak penelitian

dalam bidang ini. Meskipun teori ini memiliki kritik dan keterbatasannya, konsep-konsep Durkheim tetap relevan dalam memahami dinamika dan struktur sosial.

Analisis ketidakefektifan ini melalui lensa Teori Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika sosial yang terlibat. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Perkembangan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk:**
Kabupaten Bogor mengalami perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Dalam perspektif Durkheim, pertumbuhan ekonomi dan penduduk dapat memengaruhi struktur sosial dan fungsi masyarakat. Ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah bisa muncul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan ini dan kapasitas infrastruktur serta kebijakan pengelolaan sampah yang ada.
2. **Perubahan Struktur Sosial:**
Dengan berubahnya struktur sosial, seperti diversifikasi ekonomi dan perubahan dalam tata nilai masyarakat, pengelolaan sampah dapat menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Teori Struktural Fungsionalisme dapat membantu memahami bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi fungsi-fungsi sosial dan menciptakan ketidakefektifan dalam sistem pengelolaan sampah.
3. **Fungsi Pemerintah dan Keterbatasan Sumber Daya:**
Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah sangat penting. Ketidakefektifan dapat muncul akibat keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi keuangan maupun infrastruktur. Durkheim menekankan pentingnya fungsi pemerintah dalam menjaga stabilitas

sosial, dan ketidakefektifan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem sosial.

4. **Keterlibatan Masyarakat dan Solidaritas Sosial:**
Teori Struktural Fungsionalisme menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial. Ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah bisa disebabkan oleh kurangnya solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam analisis Durkheim, ketidakseimbangan ini dapat mengancam integrasi sosial.
5. **Anomie dan tantangan lingkungan:**
Ketidakefektifan pengelolaan sampah dapat menciptakan kondisi anomie, yaitu perasaan kebingungan atau kehilangan arah dalam masyarakat. Ketidakseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh ketidakefektifan ini dapat menciptakan tantangan baru bagi norma-norma dan nilai-nilai masyarakat.
6. **Dampak Kesehatan Masyarakat:**
Ketidakefektifan pengelolaan sampah dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Penyakit yang disebabkan oleh limbah yang tidak terkelola dengan baik dapat menciptakan disrupsi dalam fungsi kesehatan masyarakat, menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui lensa struktural fungsionalisme.
Melalui pemahaman Teori Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim, diharapkan analisis ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dapat mengidentifikasi akar masalah yang lebih mendalam. Dengan memahami interaksi antara berbagai elemen dalam masyarakat, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat bersifat holistik dan mendukung stabilitas sosial serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor.

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan Masyarakat dan aspek-aspek sosial lainnya. Teori structural fungsionalisme membantu memahami bagaimana kegagalan dalam fungsi-fungsi sosial ini dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial.

Pembahasan analisis ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor melalui lensa Teori Struktural Fungsionalisme Emile Durkheim dapat melibatkan pemahaman aspek- aspek berikut:

1. Integrasi Sosial:

Teori Struktural Fungsionalisme menekankan pentingnya integrasi sosial dalam menjaga keseimbangan Masyarakat. Analisis ini dapat mencakup bagaimana ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah dapat mempengaruhi integrasi sosial di Kabupaten Bogor. Misalnya, apakah masalah pengelolaan sampah menciptakan ketidakharmonisan atau ketegangan di antara Masyarakat? Jawabannya tentu saja iya, Apabila sampah dibuang langsung ke lingkungan tanpa dikelola terlebih dahulu, maka dapat menyebabkan pengurangan nilai kebersihan, keindahan, kenyamanan dan timbulnya media penularan penyakit yang disebabkan oleh lalat, tikus, nyamuk dan kecoa. Sampah yang dibuang begitu saja tanpa pengelolaan sampah yang baik juga dapat membuat kualitas lingkungan menurun, seperti udara, tanah juga sumber air menjadi tercemar serta dampak pencemaran B3 (limbah industri, pertambangan, cat, knalpot kendaraan bermotor, baterai bekas, kaleng) cukup berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan di Masyarakat dan timbulnya rasa tidak nyaman saat beraktifitas sehingga terciptanya

ketidakharmonisan dan ketegangan di Masyarakat.

2. Solidaritas Sosial:

Dalam Perspektif Durkheim, solidaritas sosial adalah kunci untuk stabilitas Masyarakat. Analisis dapat menilai bagaimana ketidakefektifan dalam pengelolaan sampah memengaruhi tingkat solidaritas di Kabupaten Bogor. Apakah masalah ini menyebabkan pemisahan atau ketidaksetujuan di antara kelompok- kelompok sosial? Tentunya secara umum masalah pengelolaan sampah dapat menyebabkan ketidaksetujuan di antara kelompok- kelompok sosial. Misalnya, perbedaan pendapat yang dapat muncul antara pemerintah, Masyarakat, dan sektor swasta mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah sampah. Beberapa kelompok mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang program pemilahan sampah, kebijakan daur ulang, atau lokasi pembuangan akhir sampah. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, mendengarkan berbagai pandangan, dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah, pelibatan masyarakat dan pendekatan partisipatif dapat membantu mengurangi ketidaksetujuan dan menciptakan pemahaman bersama agar pengelolaan menjadi efektif. Saat ini di Kabupaten Bogor pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan di buat nya bank- bank sampah di beberapa wilayah yang tentunya merupakan sebuah solidaritas sosial yang dilakukan para pemangku kepentingan dan Masyarakat.

3. Fungsi- fungsi Sosial:

Identifikasi fungsi- fungsi sosial yang terganggu akibat ketidakefektifan pengelolaan sampah. Misalnya, bagaimana ketidakefektifan ini memengaruhi kesehatan Masyarakat, lingkungan dan atau ekonomi lokal,

serta adakah ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab atau manfaat sosial. Tentunya ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek sosial. Beberapa fungsi sosial yang mungkin terganggu akibat masalah pengelolaan sampah yang tidak efektif di Kabupaten Bogor yaitu:

a. Kesehatan Masyarakat:

- Penumpukan sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit, seperti penyakit menular dan infeksi yang disebabkan oleh lalat, tikus, kecoa dsbnya;
- Pencemaran air dan udara dari limbah sampah juga dapat mengancam kesehatan Masyarakat secara keseluruhan.

b. Lingkungan:

- Pencemaran tanah, air, dan udara akibat limbah sampah dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan lingkungan;
- Adanya limbah yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak keindahan alam seperti tempat wisata.

c. Ekonomi Lokal:

- Pariwisata bisa saja dapat terpengaruh negatif karena lingkungannya yang kotor dan tidak terjaga;
- Ketidakmampuan memanfaatkan potensi ekonomi dari daur ulang sampah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

d. Manfaat Sosial:

- Ada kemungkinan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab antara pihak-pihak terkait;
- Kelompok Masyarakat tertentu mungkin lebih terpapar risiko kesehatan dan lingkungan

akibat ketidaksetaraan dalam distribusi dampak dari ketidakefektifan pengelolaan sampah.

e. Sosial dan Budaya:

- Sampah yang berserakan dapat merusak tatanan sosial dan kebersamaan dalam Masyarakat;
- Kesadaran lingkungan yang rendah dapat menciptakan divisi antara kelompok yang peduli lingkungan dan yang tidak.

f. Pendidikan:

- Ketidakmampuan mengelola sampah dengan baik dapat menghambat Upaya Pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan Masyarakat;
- Pendidikan tentang manajemen sampah yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman akan dampaknya pada kesehatan dan lingkungan.

Dalam mengatasi ketidakseimbangan ini, penting untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Distribusi tanggung jawab yang adil dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dapat membantu mencapai solusi yang berkelanjutan dan menyeluruh.

4. Peran Institusi:

Tinjau peran pemerintah daerah dan institusi terkait dalam pengelolaan sampah. Analisis dapat menilai sejauh mana institusi-institusi tersebut berkontribusi pada keefektifan atau menghadapi kendala structural tertentu dapat di Atasi.

1. Pemerintah Daerah:

- Perencanaan dan Kebijakan: Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk merencanakan juga menerapkan kebijakan pengelolaan sampah

yang efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

- Pengumpulan dan Pengelolaan Sampah: Pemerintah daerah biasanya memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengumpulan sampah, mengelola tempat pembuangan akhir, dan mungkin juga mendukung program daur ulang.
 - Penyuluhan dan Pendidikan: Melalui dinas lingkungan hidup atau departemen terkait, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan kampanye sosialisasi maupun pembelajaran edukasi untuk meningkatkan jumlah kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
2. Dinas Lingkungan Hidup atau Instansi Terkait:
- Pengawasan dan Pengendalian: Dinas lingkungan hidup atau instansi terkait memiliki peran dalam mengawasi aktivitas pengelolaan sampah, menegakkan peraturan, dan menindak pelanggaran yang mungkin terjadi.
 - Penyusunan Program Daur Ulang: Instansi ini dapat memainkan peran dalam merancang dan melaksanakan program daur ulang agar tempat pembuangan akhir sampah terminimalisir jumlah kapasitas yang masuknya.
 - Inovasi dan Penelitian: Dalam pengelolaan sampah bisa melalui kerjasama dengan lembaga penelitian atau pihak swasta, pemerintah dengan mendukung adanya inovasi.
3. Kerjasama dengan Pihak Swasta dan LSM:
- Pengelolaan Sampah Secara Bisnis: Kerjasama dengan sektor swasta dapat mencakup pengelolaan sampah secara bisnis, termasuk pemanfaatan sampah sebagai bahan baku atau layanan pengelolaan sampah yang inovatif.

- Proyek-Program Bersama: Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan LSM dan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk melaksanakan proyek-program pengelolaan sampah bersama, seperti kampanye pembersihan atau pelatihan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas pengelolaan sampah seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dukungan dari berbagai pihak dapat memperkuat upaya untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut tentang situasi terkini di Kabupaten Bogor, disarankan untuk merujuk pada sumber berita lokal atau pemerintah daerah setempat.

Kabupaten Bogor itu sendiri telah mempunyai regulasi terkait pengelolaan sampah yaitu, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan Kembali, pendaur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan Masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya (Perda Kab. Bogor No. 2 Th 2014). Dalam hal ini Pemerintah daerah telah melakukan perannya sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dengan mengeluarkan regulasi tersebut. Kerjasama operasi dan/atau jasa pengelolaan sampah juga sudah dilaksanakan bersama dimana pemerintah daerah telah melakukan mitra kerja dengan para pelaku usaha dalam pengelolaan sampah contohnya bersama pemerintah daerah bersama unit pasar cariu yang merupakan bagian dari Perusahaan daerah pasar tohaga

kabupaten bogor yang menerapkan pengolahan pengelolaan sampah organik menggunakan media ulat maggot/larva sebagai salah satu cara pengelolaan sampah di Kawasan tersebut. peran serta Masyarakat juga telah terlaksana di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor yakni salah satunya dengan adanya bank bank sampah yang sudah dilaksanakan di berbagai tingkat RT & RW sebagai bentuk cara pengelolaan sampah dalam pengolahan sampah dengan cara meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah; menumbuhkembangkan kepeloporan Masyarakat dalam pengelolaan sampah; meningkatkan ketanggapdaruratan atau Tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengelolaan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, SPA, TPA atau TPPAS yang membahayakan; dan menyampaikan informasi, laporan, saran dan/ atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pelaku usaha juga dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan: penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah; bantuan prasarana dan sarana; bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan pembinaan pengolahan sampah kepada Masyarakat (PortalResmiKabupatenBogor, 2023).

5. Keterlibatan Masyarakat:

Fungsionalism menekankan pentingnya keterlibatan Masyarakat dalam mempertahankan keseimbangan sosial. Evaluasi dapat dilakukan terhadap sejauh mana Masyarakat terlibat dalam solusi pengelolaan sampah dan apakah ada ketidakpartisipan yang dapat merusak stabilitas sosial. Sejauh ini, keterlibatan Masyarakat di berbagai tingkatan sangat penting untuk kesuksesan program pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dapat mencakup pemilahan sampah di rumah, partisipasi dalam program daur

ulang, serta dukungan terhadap inisiatif pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Di Kabupaten Bogor itu sendiri sejak Januari 2020 sudah melibatkan lebih dari 20 orang kelompok swadaya Masyarakat dan berhasil meningkatkan daur ulang hingga 20.154 ton sampah. Lembaga pengelola sampah secara mandiri bisa bergerak secara optimal. Program dari tiga lokasi yang menjadi pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor terus berkelanjutan dan menjadi percontohan khususnya di Wilayah Kabupaten Bogor. Optimalisasi TPS3R dan Bank Sampah berfokus pada tiga lokasi yakni TPS3R GreenAltari di Kecamatan Ciomas, Bank Sampah GaneshaLestar di Kecamatan Telaga Kahuripan, dan Bank Sampah Lisan Bumi di Kecamatan Cilebut Timur. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan prinsip ekonomi melingkar pada pengelolaan sampah Kabupaten Bogor dan KSM yang terlobat juga dapat menciptakan peluang ekonomi bagi lingkungan sekitar. Program Optimalisasi TPS 3R dan Bank Sampah ini merupakan salah satu layanan community development waste4change yang mengutamakan keterlibatan Masyarakat untuk memastikan adanya sisi sustainability dari system manajemen sampah yang sudah terbangun, sehingga menjadi salah satu slousi efektif bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor (Komarudin, 2021). Dan kurangnya partisipasi masyarakat dapat menimbulkan beberapa hal yang berdampak negatif seperti pencemaran lingkungan, risiko kesehatan, ketidakseimbangan sosial dan ketidaksetaraan dalam dampak lingkungan dan kesehatan, serta kurang kesadarannya lingkungan di kalangan Masyarakat yang dapat menghambat Upaya untuk menciptakan budaya peduli

lingkungan. Maka dari itu untuk mengatasi potensi ketidakpartisipan, penting untuk kita melakukan Upaya penyuluhan dan Pendidikan kepada Masyarakat agar meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, perlu ada insentif positif seperti program-program penghargaan atau pengakuan untuk mendorong partisipasi Masyarakat.

Ketidakpartisipan yang signifikan dapat merusak stabilitas sosial, terutama jika konflik muncul antara kelompok-kelompok Masyarakat dan komunikasi antara pemerintah, Masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya penting untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas sosial.

6. Ketidakseimbangan Struktural:

Analisis ini dapat menyelidiki ketidakseimbangan dalam struktur sosial yang muncul sebagai akibat ketidakefektifan pengelolaan sampah. Ketidakseimbangan dalam struktur sosial akibat ketidakefektifan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor bisa mencakup berbagai aspek, termasuk distribusi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak merata di antara kelompok-kelompok masyarakat. Berikut beberapa diantaranya:

a. Dampak Kesehatan yang Tidak Merata:

Jika pengelolaan sampah tidak efektif, risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Kelompok yang tinggalnya dekat dengan TPA atau area yang terpapar polusi lebih besar mungkin menghadapi dampak kesehatan yang lebih signifikan.

b. Ekonomi Lokal dan Pariwisata:

Jika ketidakseimbangan dalam pengelolaan sampah merugikan keindahan alam atau kebersihan lingkungan, ini dapat mempengaruhi sektor pariwisata dan usaha lokal.

Beberapa kelompok ekonomi lokal atau usaha pariwisata mungkin lebih terdampak daripada yang lain.

c. Akses Terhadap Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap pendidikan atau informasi mungkin kurang menyadari dampak buruk dari ketidakefektifan pengelolaan sampah. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pemahaman dan kesadaran lingkungan.

d. Pengangguran atau Penurunan Kesejahteraan Ekonomi:

Jika masalah pengelolaan sampah berdampak pada sektor ekonomi tertentu, misalnya, jika bisnis atau industri terkait sampah mengalami penurunan, kelompok masyarakat yang bekerja di sektor tersebut mungkin menghadapi risiko pengangguran atau penurunan kesejahteraan ekonomi.

e. Pengaruh Politik dan Partisipasi:

Ketidaksetaraan dalam partisipasi politik atau pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah dapat muncul. Kelompok masyarakat tertentu mungkin memiliki akses atau pengaruh tertentu dibandingkan dengan yang lain dalam proses pembuatan kebijakan.

f. Persepsi Terhadap Lingkungan dan Kualitas Hidup:

Perbedaan dalam persepsi dan kualitas hidup antara kelompok masyarakat dapat muncul. Kelompok yang tinggal di lingkungan yang terpengaruh secara langsung oleh ketidakseimbangan pengelolaan sampah mungkin mengalami penurunan kualitas hidup dibandingkan dengan kelompok yang tinggal di lingkungan yang lebih terjaga.

Ketidakseimbangan semacam itu bisa memperburuk disparitas sosial dan

ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan dan solusi pengelolaan sampah yang memperhitungkan dampak secara menyeluruh dan berusaha mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan. Pemahaman yang lebih baik tentang perspektif masyarakat dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

7. Dampak pada Integrasi dan Stabilitas Sosial:

Ketidakefektifan pengelolaan sampah dapat memiliki dampak lebih lanjut terhadap integrasi dan stabilitas sosial di Kabupaten Bogor. Beberapa dampak yang mungkin muncul termasuk: Kesulitan dalam pengelolaan sampah, terutama terkait dengan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau metode pengelolaan tertentu, dapat memicu konflik antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atau pandangan berbeda; Pengelolaan sampah yang buruk dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat. Baiknya integrasi sosial tergantung pada kesejahteraan dan kualitas lingkungan hidup yang dirasakan oleh Masyarakat; Jika pemerintah daerah dianggap tidak efektif dalam menangani masalah pengelolaan sampah, ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan integrasi: Dampak ketidakefektifan pengelolaan sampah dapat menciptakan pembatasan akses atau pelayanan dasar terhadap beberapa masyarakat, Ini dapat merugikan integrasi sosial; Jika dampak negatif dari ketidakefektifan pengelolaan sampah didistribusikan secara tidak merata di antara berbagai kelompok masyarakat, ini dapat memperburuk ketidaksetaraan dan merugikan integrasi sosial: Kabupaten Bogor memiliki potensi pariwisata. Pengelolaan sampah yang buruk dapat merugikan daya tarik wisata dan mempengaruhi hubungan antara masyarakat lokal dan para wisatawan;

Masalah pengelolaan sampah yang berkepanjangan dapat memengaruhi kebersamaan dan solidaritas masyarakat. Peningkatan ketegangan atau konflik dapat merusak integrasi sosial.

Untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, penting untuk mendukung masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola sampah dengan baik, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan implementasi solusi yang berkelanjutan. Integrasi sosial dan stabilitas memerlukan kerjasama dan pemahaman bersama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengelola sampah.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan penelitian yaitu menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan aspek-aspek sosial lainnya. Teori Struktural Fungsionalisme membantu memahami bagaimana kegagalan dalam fungsi-fungsi sosial ini dapat mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial. Berdasarkan analisis Teori Struktural Fungsionalisme, ditemukan bahwa perbaikan dalam pengelolaan sampah memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan peran semua pihak dalam masyarakat.

Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, partisipasi aktif dalam program daur ulang, serta perbaikan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini memberikan kontribusi pemahaman tentang permasalahan pengelolaan sampah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor melalui perspektif Teori Struktural Fungsionalisme.

Hasil analisis dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam

mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dan menjaga keseimbangan struktur sosial di Kabupaten Bogor. Sebuah analisis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bogor melalui lensa teori struktural fungsionalisme Emile Durkheim dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan sampah berperan dalam struktur sosial dan fungsi masyarakat. Berikut adalah kesimpulan yang mungkin dihasilkan dari analisis tersebut:

- 1) Fungsi Integratif: Sejalan dengan konsep fungsionalisme, pengelolaan sampah memiliki fungsi integratif dalam masyarakat Kabupaten Bogor. Proses ini membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial dengan menciptakan aturan dan norma terkait pengelolaan sampah yang diikuti oleh seluruh masyarakat.
- 2) Pentingnya Norma-Norma Sosial: Teori fungsionalisme menekankan pentingnya norma-norma sosial dalam menjaga kohesi sosial. Dalam konteks pengelolaan sampah, norma-norma terkait pemilahan, daur ulang, dan perlakuan terhadap sampah memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku masyarakat.
- 3) Peran Pemerintah dan Institusi: Pemerintah dan institusi terkait, sesuai dengan teori struktural fungsionalisme, dianggap sebagai penjaga norma dan regulator dalam masyarakat. Dalam pengelolaan sampah, peran pemerintah dalam merancang kebijakan, mengawasi implementasi, dan memberikan sanksi adalah aspek penting dalam memastikan integritas sosial.
- 4) Fungsi Adaptasi: Pengelolaan sampah perlu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup implementasi teknologi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur, dan pendekatan-pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah.
- 5) Dampak terhadap Solidaritas Sosial: Ketidakseimbangan dalam pengelolaan sampah dapat berdampak pada solidaritas sosial. Jika masalah ini tidak diatasi dengan baik, dapat timbul konflik antarindividu atau kelompok masyarakat, sehingga merusak solidaritas dan kebersamaan.
- 6) Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran: Teori struktural fungsionalisme menyoroti pentingnya pendidikan dalam membentuk nilai dan norma sosial. Oleh karena itu, upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat membantu memperkuat struktur sosial.
- 7) Keterlibatan Aktif Masyarakat: Masyarakat perlu terlibat aktif dalam proses pengelolaan sampah. Konsep "anomie" atau kekosongan norma dapat diminimalkan dengan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Dalam kesimpulan, analisis melalui lensa struktural fungsionalisme Emile Durkheim dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pengelolaan sampah memainkan peran penting dalam membentuk dan menjaga struktur sosial di Kabupaten Bogor. Pentingnya integrasi sosial, pematuhan terhadap norma, dan keterlibatan masyarakat merupakan kunci yang perlu diperhatikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas dalam mengelola sampah dan menjaga stabilitas sosial. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara norma sosial, partisipasi masyarakat, dan infrastruktur yang efektif untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah dan menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Bogor, dengan menggunakan program bank sampah sebagai bentuk pengelolaan sampah dalam pengolahan yang meningkatkan keterampilan, kemandirian, pemberdayaan dan mitra dalam pengelolaan sampah.

Ketidakefektifan pada sebuah pengelolaan sampah di suatu wilayah menjadi topik serius yang memerlukan perhatian dan solusi bersama. Sebagaimana halnya di Kabupaten Bogor, ketidakefektifan pengelolaan sampah saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya;

- Pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan
- Kondisi infrastruktur pengelolaan sampah yang kurang memadai
- Kurangnya fasilitas daur ulang sampah
- Sistem pengangkutan sampah yang tidak efisien
- Minimnya pemahaman masyarakat tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah
- Adanya perubahan gaya hidup konsumtif masyarakat yang tidak lepas dari penggunaan kemasan plastik dan barang-barang sekali pakai
- Keterbatasan anggaran juga merupakan kendala utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor, karena untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan ramah lingkungan memerlukan biaya investasi awal dan pemeliharaan yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor. 81 Tahun 2012*. 66(4), 37–39.
- Aris. (n.d.). *Pengertian Teori Struktural Fungsional Menurut Beberapa Ahli*. Gramedia Blog.
- BPS. (2023). *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2023*.
- DisperkimJabar. (2021). *Jumlah Timbunan Sampah Kota Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Open Data Jabar.
- Indah Ainur Rohmah. (2021). *Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Dalam komaMeningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Intan Muning Harjanti & Pratamaningtyas Anggraini (2020). *Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang*. *Jurnal Planologi* Vo. 17, No. 2.
- Komarudin. (2021, Mei 05). *Bogor Berhasil Kelola Sampah 20 Ton Lebih, Bagaimana Caranya?*. Liputan 6.
- Kusnandar, V. B. (2023). *Kabupaten Bogor Miliki Penduduk Terbanyak Nasional pada 2022*. Databoks.mdk/fik. (2023). *2.100 Ton Sampah di Kabupaten Bogor Tak Bisa Diangkat ke TPAS Setiap Hari*. Merdeka.Com.
- Nur Aini. (2022). *DLH Kabupaten Bogor akan Terapkan Zonasi Pengelolaan Sampah*. Republik.
- Okusa, M. (2008). *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008*. 69–73.
- Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 (2014).
- Portal Resmi Kabupaten Bogor. (2023, Maret 14). *PD PPJ Belajar Pengolahan Sampah Organik ke Pasar Cariu*.
- R. Mohamad Mulyain, Mohamad Iqbal & Kuncoro Ariawan (2018). *Konflik Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta Dan Upaya Mengatasinya*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15 No.2 hal. 179-191.
- S. Hariyanto (2014). *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern*. Ar-Ruzz Media, 52.
- Yulia Sepriani (2018). *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018*. *JOM FISIP* Vol. 8.
- Zainudin Maliki (2012). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Gadjah Mada University, 83.